



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1973

TENTANG

**MENUGASKAN KEPADA MENTERI LUAR NEGERI (KETUA DELEGASI
REPUBLIK INDONESIA) PADA KONPERENSI INTERNASIONAL
MENGENAI VIETNAM DI PARIS TANGGAL 20 PEBRUARI 1973**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk
pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke
Konperensi Internasional mengenai Vietnam di Paris, pada tanggal
26 Pebruari 1973.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1973.

MENGINSTUKSIKAN :

Kepada : Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi Pemerintah Republik
Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menghadiri Konperensi Internasional mengenai Vietnam di Paris
pada tanggal 26 Pebruari 1973 sampai selesai.

KEDUA : Mempergunakan petunjuk-petunjuk Pengarahan seperti terlampir
pada instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman, dalam
menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi
tersebut.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama berlangsungnya Konperensi tersebut.
- KEEMPAT : Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.
- KELIMA : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Konperensi Internasional, mengenai Vietnam di Paris pada tanggal 26 Pebruari 1973.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Pebruari 1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN R.I.
NOMOR 1 TAHUN 1973
TENTANG
PETUNJUK-PETUNJUK PENGARAHAN UNTUK DELEGASI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI INTERNASIONAL MENGENAI
VIETNAM DI PARIS, PADA TANGGAL 26 FEBRUARI 1973.

UMUM

1. Dalam rangka melanjutkan kebijaksanaan Pemerintah untuk secara aktif dan konkrit ikut menyumbang kepada tercapainya perdamaian di Indo-Cina umumnya, Vietnam khususnya, sebagaimana telah di wujudkan pula oleh partisipasi R.I dalam I.C.C.S. dan prakarsa mengadakan Konperensi Para Menteri Luar Negeri ASEAN di Kuala Lumpur baru-baru ini, Pemerintah telah menerima baik undangan untuk ikut serta pada Konperensi Internasional mengenai Vietnam, yang akan dilangsungkan di Paris mulai tanggal 26 Pebruari 1973.
2. Partisipasi R.I pada Konperensi Internasional di Paris tersebut didasarkan atas pertimbangan pokok bahwa setiap perkembangan di Indo-Cina, yang positif maupun yang negatif, mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan-perkembangan di Asia Tenggara secara keseluruhan, termasuk di Indonesia sendiri.
3. Peperangan yang berlarut di Indo-Cina merupakan penghalang tercapainya stabilitas dan ketentraman di wilayah Asia Tenggara, yang kedua-duanya merupakan kondisi yang mutlak diperlukan bagi suksesnya usaha pembangunan nasional bangsa-bangsa Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia berkepentingan langsung bahwa perdamaian di Indo-Cina, khususnya di Vietnam, benar-benar dapat di wujudkan dan sarana utama kearah itu ialah dengan ikut mengusahakan suksesnya Konperensi Internasional di Paris yang bertujuan menjamin pelaksanaan Persetujuan Paris secara jujur oleh semua pihak.

4. Partisipasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Partisipasi R.I. dalam Konperensi Paris ini lebih bermakna penting lagi mengingat bahwa R.I, adalah satu-satunya negara ASEAN yang ikut serta, bahkan di luar negara-negara yang langsung terlibat dalam sengketa Vietnam, merupakan satu-satunya negara Asia yang hadir.

Oleh karenanya, suara yang dibawakan oleh Delegasi R.I harus pula mencerminkan suara dan aspirasi negara-negara ASEAN, dan peranan positif R.I dalam Konperensi Paris dapat dijadikan modal yang berharga bagi pengamanaan kepentingan-kepentingan nasional dan regional kita dalam pertumbuhan suatu Asia Tenggara baru dimasa depan.

KHUSUS

1. Indonesia diharap agar berusaha supaya Konperensi Internasional tidak mengalami kegagalan, oleh karena penyelesaian dilapangan sangat ditentukan oleh hasil-hasil perundingan politik. Perlu dikemukakan, bahwa situasi dilapangan bergerak kearah keadaan yang lebih positif.

Pada prinsipnya Indonesia berusaha agar mengurangi jatuhnya korban baru. Dalam hubungan ini Indonesia dibina oleh suatu prinsip, bahwa dengan perginya Tentara Asing dari Vietnam, setelah masalah Vietnam diserahkan kepada rakyat Vietnam sendiri, keadaan tidak boleh menjadi lebih buruk.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan sesuai dengan bunyi Artikel 19, Chapter IV dari Perjanjian tentang pengakhiran Perang dan Pemulihan Perdamaian di Vietnam, Delegasi Indonesia akan berusaha, supaya semua pihak yang menghadiri Konperensi Internasional mengakui hasil-hasil dari Perundingan Perdamaian antara Amerika Serikat dengan Vietnam Utara, dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai tercantum dalam Artikel 19 itu.

3. Visualisasi Indonesia mengenai terlaksananya perdamaian di Vietnam adalah jika Perjanjian Perdamaian di Paris itu dilaksanakan dengan jujur oleh semua pihak. Dalam hubungan ini Pemerintah yang akan diakui oleh Indonesia di Vietnam Selatan adalah hasil Pemilihan Umum, yang diharapkan dapat mewakili kekuatan-kekuatan sosial-politik yang sesungguhnya di Vietnam Selatan.

4. Delegasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Delegasi Indonesia tidak boleh memihak kepada salah satu Partai yang bersengketa, dan sementara mengambil sikap mempelajari fikiran-fikiran yang berkembang dalam Konperensi Internasional.
5. Delegasi Indonesia dalam sidang permulaan Konperensi Internasional tidak akan mengemukakan hal-hal yang bersifat detail, melainkan mengemukakan issue-issue yang besar saja.
6. Indonesia berpendapat bahwa yang dapat memberikan garansi fisik untuk menyudahi perang dan memelihara perdamaian di Vietnam adalah Amerika Serikat dan Sovyet Uni. Apabila semua peserta Konperensi mengakui perjanjian Paris, ini merupakan "build in guarantee".

Jakarta 22 Pebruari 1973.